

REGIONALISME TERBUKA DI ASIA TENGGARA PADA PROSES EFEKTIFITAS LEMBAGA REGIONAL (STUDI KASUS ASEAN)

Indra Pahlawan dan Cifebrima Suyastri

Dosen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini menganalisis realitas Regionalisasi di Kawasan Asia Tenggara dan ini tentunya dengan relevansinya dengan masa sekarang dan bagaimana prospek serta tantangannya ke depan untuk membawa Asia Tenggara secara wilayah dan negara-negara anggota ASEAN secara politik ekonomi pada tujuan utama ASEAN. AFTA yang dibentuk dengan tujuan utama meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar internasional dan diharapkan untuk meningkatkan perdagangan-perdagangan intrakawasan ternyata tidak terimplementasi dengan sempurna. Godaan untuk menjalin sebuah kerja sama baik bilateral maupun multilateral negara-negara Anggota ASEAN dengan negara maupun organisasi di luar kawasan ASEAN seperti Amerika, Inggris, Uni Eropa, negara-negara Asia Pasifik, negara-negara Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea, ternyata jauh lebih menggoda. Sampai kemudian ada kita mengenal forum EAEC (East Asian Economical Caucus), ASEAN+3, ASEAN+1, bahkan ASEAN+6. Kepentingan politik nasional setiap bangsa dan negara pendiri diberikan secara berdaulat pada masing-masing negara anggota sehingga secara sederhana dipahami bahwa ASEAN walaupun berwajah organisasi regional di berbagai bidang kerja sama, tapi dalam implementasinya hanya bergerak di bidang ekonomi karena tidak memiliki wewenang untuk saling mencampuri urusan politik dan stabilitas nasional dalam negeri setiap negara anggota, meskipun kesadaran akan dampak konflik lokal itu pada nantinya akan memicu konflik kawasan region Asia Tenggara disadari oleh setiap negara anggota.

Keyword : Regionalisme, Tantangan, Ekonomi, Politik, Konflik Kawasan

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Arsitektur kerja sama kawasan di Asia saat ini mencakup banyak forum, dari kerja sama subkawasan hingga kerja sama antar kawasan. Forum-forum ini menawarkan kemampuan untuk mengatasi isu-isu bervariasi dari kerja sama teknis sampai kesepakatan global yang luas dan inter regional. Upaya-upaya ini sering berpusat pada Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang memiliki sejarah panjang tentang dan kerangka kerja yang maju bagi kerja sama regional.



Secara bersamaan, forum-forum ini menawarkan arsitektur dengan berbagai jalur dan berbagai kecepatan yang sangat sepadan dengan banyaknya tantangan dan keragaman yang luas di kawasan ini. Arsitektur ini juga menciptakan persaingan sehat di antara forum untuk menunjukkan efektivitas mereka.

Association of South East Asian Nation (ASEAN) menjadi model regionalisme yang dianut secara loyal oleh para anggotanya dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama ekonomi maupun politik. Pada proses dasar terminologi “region” ASEAN mencapai bentuk ideal sebuah kawasan yang menerapkan regionalisasi dan bercita-cita mencapai unifikasi yang mensejahterakan anggotanya. Akankah regionalisme di ASEAN sendiri akan mencapai kemaksimalan dalam pencapaian visi sementara forum yang ada masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana.

Regionalisme terbuka dalam ASEAN berkembang dalam sejarah awal pada tanggal 28 Januari 1992 pada konferensi Tingkat Tinggi ASEAN IV yang berlangsung di Singapura pada tanggal 27 sampai dengan 28 Januari 1992 yang menghasilkan Deklarasi Singapura 1992. Deklarasi ini pada intinya tekad bersama para kepala pemerintahan di ASEAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik guna mengamankan perdamaian dan kesejahteraan negara-negara anggota ASEAN. Secara khusus, mendorong kawasan ekonomi terbuka dan merangsang kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN.

Dua buah dokumen penting, yaitu *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* dan *Basic Agreement on the Common Effective Preferential Tariff for the ASEAN Free Trade Area* telah ditandatangani oleh para menteri ekonomi ASEAN. Framework kerjasama ini merupakan landasan baru bagi perekonomian ASEAN terutama kesepakatan untuk membahas Perdagangan Bebas Hambatan ASEAN yang direncanakan berlaku penuh pada tahun 2008. AFTA bila dilihat dari kacamata regionalisme terbuka tentulah membutuhkan analisis yang lebih panjang pada jangka waktu yang cukup untuk membuktikan apakah istilah regionalisme terbuka secara positif merupakan teori yang sesuai dengan yang terjadi di AFTA atau malah menjadi alat politik sebagai pembenaran atas proses regionalisasi jenis lain yang terjadi di ASEAN.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Perkembangan regionalisme Asia Tenggara atau ASEAN menjadi sorotan dalam prospek dunia secara global. Kawasan ASEAN sebagai bagian dari Asia memiliki prospek pertumbuhan dan pasar yang cukup menarik bagi negara-negara Barat, walaupun masih dibayangi-bayangi dengan sederet permasalahan internal negara dan masih rapuhnya infrastruktur sosial ekonomi. Satu hal yang pasti adalah, krisis keuangan Asia telah membuat rapuhnya koalisi-koalisi dominan di wilayah Asia Pasifik. Setelah terjadinya krisis, arah pembangunan ekonomi di Asia Tenggara berkembang lebih beragam sebagai bentuk respon terhadap krisis.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana konsep dan implementasi regionalisme terbuka di Asia Tenggara dalam proses yang telah dijalankan pada *ASEAN Free Trade Area* atau AFTA. Apakah konsep regionalisme terbuka secara positif merupakan teori yang sesuai dengan yang terjadi di AFTA atau malah menjadi alat politik sebagai pembenaran atas proses regionalisasi jenis lain yang terjadi di ASEAN?

TINJAUAN PUSTAKA

Kelompok pemikir yang melihat regionalisme pada insentif-insentif ekonomi mengkontraskan tindakan liberalisasi yang dilakukan melalui kerangka kerjasama regional dengan tindakan yang dilakukan melalui kerangka kerjasama multilateral. Tindakan liberalisasi melalui kerjasama regional dapat dilakukan melalui berbagai tahap dan mekanisme.

Karena penekanan yang sangat besar pada dimensi ekonomi, yang menjadi fokus analisis semacam ini adalah pada beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah tindakan-tindakan liberalisasi yang diluncurkan melalui program kerjasama regional itu lebih memberikan manfaat bagi negara-negara anggota dibandingkan dengan tindakan liberalisasi melalui kerangka kerjasama multilateral?
2. Apakah tindakan-tindakan liberalisasi kerjasama regional merupakan *building bloc* yang memperkuat liberalisasi dalam kerangka multilateral, atau sebaliknya, menjadi *stumbling bloc* terhadap liberalisasi kerjasama multilateral.



Kajian yang memusatkan pada insentif ekonomi dari kerjasama regional sesungguhnya tidak hanya muncul dari kalangan tradisional, melainkan juga dari kalangan *political economist* yang beraliran strukturalis kiri. Namun berbeda dengan kalangan ekonom tradisional, kalangan akademisi yang menganut pandangan strukturalis kiri menyatakan bahwa kerjasama regional sebenarnya merefleksikan kepentingan ekonomi dari para pelaku bisnis transnasional. Dengan tujuan untuk memperbesar ruang gerak bagi akumulasi modalnya, kalangan pelaku bisnis transnasional ini biasanya akan memberikan dukungan bagi penciptaan kerangka kerjasama ekonomi regional. Bagi strukturalis kiri, tindakan-tindakan liberalisasi ekonomi dalam kerangka kerjasama regional bagaimanapun merupakan bagian kepentingan integral dari pelaku bisnis transnasional. (Keliat, 2008).

Penjelasan yang diberikan paradigma insentif ekonomi ini belum dapat memberikan jawaban yang memuaskan karena dua alasan sederhana berikut ini. Alasan pertama adalah karena paradigma insentif ekonomi sama sekali tidak mempertimbangkan motif-motif politik dan strategis keamanan. Alasan kedua adalah karena tidak seluruh kerjasama regional dalam bidang ekonomi selalu bergerak dalam kerangka tahapan dan mekanisme seperti yang dikonsepsikan oleh para ekonom.

Ruggie (1998) menyatakan bahwa kerjasama dan institusi regional tidak berjalan secara otomatis karena alasan suatu negara bersedia melakukan kerjasama regional dapat dijelaskan oleh tiga faktor yang saling tarik menarik yaitu:

1. Manfaat langsung (*direct gain*)
2. Biaya-biaya langsung (*direct cost*)
3. Biaya interdependensi (*interdependence cost*)

Yang dimaksud dengan biaya langsung dan manfaat langsung terkait dengan perhitungan kapabilitas suatu negara. Suatu negara akan cenderung bekerja sama dalam bidang tertentu jika negara tersebut merasa bahwa kapabilitas yang dimilikinya tidak memadai untuk menangani sendiri bidang kerjasama tersebut. Demikian juga sebaliknya suatu negara akan menolak untuk bekerjasama jika memandang kapabilitasnya berlebih untuk bidang kerjasama yang ditawarkan. Perhitungan tentang kapabilitas inilah yang melahirkan istilah biaya langsung dan



manfaat langsung tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya interdependensi adalah hilangnya otonomi (*lost of outonomy*) yang dilakukan suatu negara ketika melakukan suatu kerjasama. Karena itulah menurut Ruggie kondisi minimum yang diharapkan oleh suatu negara dalam setiap kerjasama regional adalah mencapai suatu titik keseimbangan dimana manfaat yang diperoleh jika dikurangi dengan biaya langsung dan biaya interdependensi adalah sama dengan nol.

Johannes Dragsbaeck Schimdt menilai sisi lain dari proses regionalisme yang terjadi di ASEAN. Perkembangan regionalisasi di ASEAN merupakan suatu bentuk baru dalam regionalisme yang dalam bentuk awalnya merupakan penentangan sistem dari proses liberalisasi perdagangan yang terjadi di dunia. Pada ASEAN, integrasi ekonomi bertujuan bukan untuk meningkatkan perdagangan antara anggota, tetapi untuk meningkatkan arus barang dan mobilisasi investasi kedalam ASEAN.

Secara aktual, negara-negara ASEAN dapat dikatakan berhasil dalam upaya membangun pilar pertama dari cita-cita ASEAN Community, yaitu integrasi ekonomi. Diawali dengan keberhasilan menyepakati kawasan perdagangan bebas ASEAN pada tahun 2000 (walaupun implementasinya ditunda setahun), negara-negara di kawasan kemudian sepakat meningkatkan taraf integrasi menjadi Pasar Tunggal ASEAN (*Preferential Tariff Agreement*) yang diharapkan terwujud pada 2015 (sebelumnya 2020).

PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis realitas Regionalisasi di Kawasan Asia Tenggara ini tentunya dengan relevansinya dengan masa sekarang dan bagaimana prospek serta tantangannya ke depan untuk membawa Asia Tenggara secara wilayah dan negara-negara anggota ASEAN secara politik ekonomi pada tujuan utama ASEAN. AFTA yang dibentuk dengan tujuan utama meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar internasional dan diharapkan untuk meningkatkan perdagangan perdagangan intrakawasan ternyata tidak terimplementasi dengan sempurna. Godaan untuk menjalin sebuah kerja sama baik bilateral maupun multilateral negara-negara anggota ASEAN dengan negara maupun organisasi di luar kawasan ASEAN seperti Amerika, Inggris, Uni Eropa, negara-negara Asia Pasifik, negara-negara Asia Timur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



seperti Cina, Jepang, dan Korea, ternyata jauh lebih menggoda. Sampai kemudian ada kita mengenal forum EAEC (*East Asian Economical Caucus*), ASEAN+3, ASEAN+1, bahkan ASEAN+6.

Fakta-fakta menyimpang seperti ini lah yang kemudian menjadi cikal bakal tidak berhasilnya AFTA dalam implementasi praktisnya walaupun telah diratifikasi sejak 2003 silam. Jelas *Asean Free Trade Area* (AFTA) telah tidak relevan lagi diterapkan mengingat inkonsistenan yang terjadi pada negara-negara anggota yang seharusnya menerapkannya dengan baik. Menurut saya, hal ini terjadi karena belum terjalinnya “semangat kekitaan” atau solidaritas yang kuat antar sesama negara ASEAN untuk mewujudkan kemajuan sector ekonomi regional. Paradigma Realis yang bergerak di atas label negara masing-masing masih sangat kuat dalam pola pikir negara-negara anggota ASEAN dalam implementasi kebijakan ekonominya

Berangkat dari kegelisahan-kegelisahan inilah kemudian dibentuk ASEAN *Economic Community* (AEC) sebagai salah satu pilar *ASEAN Community* (AC) untuk lebih mewujudkan implementasi yang maksimal dalam perdagangan bebas untuk memajukan perekonomian regional ASEAN. Kegelisahan yang sangat besar ini kemudian segera dibalut dengan diratifikasinya lebih dulu *blue print* AEC untuk menyelamatkan sector perekonomian regional sebelum terpuruk lebih jauh, mengingatkan negara-negara di kawasa Asia Tenggara ini sangat menaruh perhatian lebih besar dalam bidang ekonomi. Kepentingan politik nasional setiap bangsa dan negara pendiri diberikan secara berdaulat pada masing-masing negara anggota sehingga secara sederhana dipahami bahwa ASEAN walaupun berwajah organisasi regional di berbagai bidang kerja sama, tapi dalam implementasinya hanya bergerak di bidang ekonomi karena tidak memiliki wewenang untuk saling mencampuri urusan politik dan stabilitas nasional dalam negeri setiap negara anggota, meskipun kesadaran akan dampak konflik lokal itu pada nantinya akan memicu konflik kawasan region Asia Tenggara disadari oleh setiap negara anggota.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kepentingan, dan perkembangan kebutuhan setiap negara anggota ASEAN, integrasi ASEAN disadari tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk kerja sama yang berpusat dalam bidang



ekonomi saja, tetapi juga dalam bidang politik, social, dan juga budaya. Karena itu, pada tahun 1994 dibentuk lah ARF (*Asean Regional Forum*) sebagai forum dalam membahas pemeliharaan kestabilan dan keamanan di Asia Pasifik. Semangat utama pembentukan forum ini mengalami perkembangan pada Pertemuan Tingkat Menteri di Vientiane, Laos pada Juli 2005 silam dari *Confidence Building Measures* menuju *Confidence Building Measures* dan *Preventive Diplomacy* (Pembangunan Rasa Saling Percaya sekaligus Pencegahan konflik dan eskalasi Konflik dalam Kawasan).

Dalam ARF di kancah forum internasional, badan bentukan ASEAN ini mengalami proses pembiasaan dengan ruang lingkup yang terlalu lebar sehingga focus utama pembahasannya kerap kali melebar ke ruang lingkup yang semestinya tidak trjamah. Meski keberadaannya pada awal pembentukan sangat membantu dalam transformasi pemikiran dalam bidang politik, tapi lambat laun forum ini semakin tak tentu arah. Indonesia yang memiliki cukup peranan dalam forum ini sebagai pihak yang dipercayai untuk mengepalai berbagai pertemuan-pertemuan pembahasan wacana global kerap kali membahas tentang hal yang tidak bersentuhan secara langsung dengan region ASEAN, misalnya saja masalah palestine-Israel, Iran-AS, Asia Pasifik-Australia-New Zealand, meski wacana-wacana yang telah saya sebutkan tadi tentu memiliki dampak meski sedikit terhadap ASEAN. Tapi jika ditinjau dari segi urgensitasnya, masih banyak wacana lokal region yang mesti dibahas, kasus Burma misalnya, Thailand, Indonesia-Filipina, Indonesia-Malaysia, dan masih banyak lagi. ARF ini aktif diimplementasikan kala ASEAN masih berlandaskan Deklarasi Bangkok yang memang sangat lemah dalam hal justifikasi hukum kelegalan organisasi, sehingga untuk memperbaiki kebiasaan yang terjadi dibutuhkan sebuah Charter/Piagam sebagai konstitusi organisasi untuk dipatuhi oleh setiap negara anggota. Disinilah kemudian peranan ASEAN Charter dengan tujuan utama yakni menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang memiliki *legal personality* (berlandaskan hukum) dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam kawasan.

Setelah berlandaskan hukum yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat kawasan, ASEAN secara tidak langsung melebarkan sayap praktik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



tanggung jawabnya kehampir seluruh sector kehidupan masyarakat region Asia Tenggara. Untuk Implementasi ini, diwujudkanlah *ASEAN Community* (AC) dengan tiga pilarnya yakni *ASEAN Economic Community* (AEC), *ASEAN Security Community* (ASC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC) yang diimplementasikan dalam Wajah Visi ASEAN 2015.

Jadi, dalam pengimplementasiannya, tidak akan ada lagi yang dikenal sebagai rakyat Indonesia, rakyat Malaysia, rakyat Vietnam, rakyat Thailand, yang ada hanya rakyat ASEAN, masyarakat ASEAN dalam satu wilayah ASEAN dengan wajah Komunitas ASEAN. Semangat “kekitaan” atau solidaritas yang lemah yang meruntuhkan keefektifan AFTA inilah yang hendak diperkuat oleh *ASEAN Community* agar dalam perdagangan internasional, perdagangan regional kawasan Asia Tenggara dapat selamat dari serangan perekonomian pihak lain yang kuat dan beragam. Konsep *ASEAN Community* ini berprinsip bahwa dalam menghadapi serangan luar secara bersama itu tentu akan lebih efektif daripada menghadapinya secara sendiri-sendiri per negara. Selain itu, dalam bidang politik antar negara kawasan pun dengan adanya konsep *ASEAN Community* ini maka permasalahan konflik internal negara juga menjadi permasalahan region, sehingga diyakini proses penyelesaiannya akan lebih maksimal dan bijak karena ditelaah secara kritis oleh banyak negara. Semangat persaudaraan akan terjalin dengan sangat erat jika *ASEAN Community* ini diterapkan secara maksimal.

ASEAN Community dengan tiga pilar utamanya yang sangat ideal adalah sebuah solusi yang sangat ideal dalam mempersiapkan kawasan Asia Tenggara untuk menghadapi persaingan global di berbagai bidang, tentunya jika dilaksanakan secara maksimal. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, negara-negara anggota ASEAN sangat beragam. ASEAN memiliki Singapura yang sangat maju dalam hal industrinya dengan populasi penduduk kaya sebanyak 55.000 jiwa dengan aset mencapai US\$ 1 juta per individu pada tahun 2005. ASEAN juga memiliki Indonesia yang masih memiliki 30 juta masyarakat miskin pada sensus tahun 2001. Ada juga Thailand yang memiliki ketidakstabilan pemerintahan selama 32 tahun terakhir. Dan Burma yang masih dalam intervensi Militer yang kuat ataukah Vietnam yang masih dipengaruhi paham komunis dalam system pemerintahannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav . "Regional Institutions and Asian Security Order: Norms, Power, and Prospects for Peaceful Change" dalam Alagappa, Muthiah. 2003. Asian Security Order: Instrumental and Normative Features. California: Stanford University Press.
- ASEAN Secretariat Informal Paper, KTT Informal ke-4 ASEAN November, 2000.
- Asian Development Bank. 2007. Key Indicators 2007. Volume 38. Manila: Asian Development Bank.
- Aslam, Mohammed, 2003. "The Impact of ASEAN-China FTA on ASEAN Economies." The Indonesian Quarterly, Vol: 31, No: 3.
- Balassa, Bela. 1961. The Theory Of Economic Integration. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Bandoro, Bantarto.1997. ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Bergsten, C. Fred. 1997. "Open Regionalism". dalam C. Fred Bergsten. (ed.) Whither APEC? The Progress to Date and Agenda for the Future. Institute for International Economics. Special Report. 9.
- Boediono, 2001. Indonesia Menghadapi Ekonomi Global. Yogyakarta: BPFE.
- Bustelo, Pablo. 2002. "The Impact of the Financial Crises on East Asian Regionalism" dalam Fu-Kuo Liu dan Philippe Régnier (ed.). Regionalism in East Asia: Paradigm Shifting?. London: Routledge-Curzon.
- Burchill, Scott. 2001. Theories of International Relations. New York: Palgrave Macmillan.
- Cantor, Robert D.. 1986. Contemporary International Politics. Minnesota: West Publishing Company.
- Collins, Alan. 2003. Security and Southeast Asia. Boulder. Colorado: Lynne Rienner.
- Coulombis, Theodore dan James Wolfe. 1986. Introduction to International Relations: Power and Justice. New Jersey: Prentice-Hall.
- Coyle, William dan Zhi Wang. 1998. "Economic Integration and Open Regionalism in APEC: The Gains for U.S. Agriculture". Regional Trade Agreements and U.S. Agriculture/AER-771.
- di Susanto."Piagam ASEAN;Babak Baru Tranformasi Organisasi"-Makalah seminar ASEAN-DEPLU,UNHAS.
- Diplin, Robert. 2001. Global Political Economy: Understanding The International Economic Order. New Jersey: Princenton University Press.
- Frankel, Jeffrey dan Shang-Jin Wei (1998). "Open Regionalism in a World of Continental Trade Blocs." *IMF Working Paper WP/98/10*.
- Garnaut, Ross. 2004. A New Open Regionalism in the Asia Pacific. Makalah dipresentasikan pada the International Conference on World Economy,



Colima, Mexico, 25 November, 2004 (diunduh pada 31 Oktober 2016 dari situs rspas.anu.edu.au/economics/publish/papers/garnaut/2004_1125_Regionalism.pdf)

Chikawa, Hiroya. 1997. "Constant-Market-Share Analysis and Open Regionalism: A Study Suggestion. dalam Omura, Keji (ed). 1997. The View of Economic and Technology Cooperation in APEC. Tokyo: APEC Study Center Series

Kelegama, Saman. 2000. Open Regionalism in the Indian Ocean. How relevant is the APEC model for IOR-ARC?. 257. Journal of the Asia Pacific Economy 5(3) 2000: 255–274.

Keliat, Makmur. 2008. Kerjasama Regional dan Politik Luar Negeri: Round Table Discussion Lemhannas RI November 2008, tidak diterbitkan.

Thoman, Thanat (1992). ASEAN Conception and Evolution. (diunduh pada 31 Oktober 2008 dari <http://www.aseansec.org/thanat.htm>)

Kuwayama, Mikio. 1999. "Open Regionalism in Pacific and Latin America: A Survey of the Literature". Seri Commerio International 4. (diunduh pada 31 Oktober 2008 dari situs www.eclac.org/publicaciones/xml/3/4283/lcl1299i.pdf)

Lim, Hank dan Matthew Walls. 2005. "ASEAN after AFTA: What's next?" Dialogue + Cooperation. Occasional Papers, Southeast Asia-Europe, Volume 10: 91-103.

Huhulima, C.P.F. 1997. ASEAN Menuju Postur Baru. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.

Milner, Helen. 1998. "International Political Economy: Beyond Hegemonic Stability". Foreign Policy. No.110.

Neumann, Manfred dan Jürgen Weigand. 2004. The International Handbook of Competition. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

OECD. 1999. Glossary of Insurance Policy Terms, Centre for Co-operation with Non-Members.

Izarrro, Ramiro. 1999. Comparative Analysis of Regionalism in Latin America and Asia-Pacific, Comercio Internacional Serie. United Nations publication, Sales No. E.99.II.G.21.

Ruggie, John Gerard. 1998. Constructing the World Politics: Essays in World International Institutionalization. London: Routledge.

Sharma, Shalendra D.. 2002. "Beyond ASEAN and APEC: Towards a New Asia-Pacific Economic Regionalism". East Asian Review. Vol. 14(3). 37-48.

utton. Michael. 2007. "Open Regionalism and the Asia Pacific: Implications for the Rise of an East Asian Economic Community". Ritsumeikan International Affairs. Vol.5. 133-152

Viotti. Paul R. dan Mark V. Kauppi. 1993. International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism. New York: McMillan Publishing Company.

Winarti . Halim . 2008. Tesis: *Regional Terbuka Di Asia Tenggara*, Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

